

## RINGKASAN

Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah guna kepentingan umum dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang dikupas dalam bentuk sebuah penulisan skripsi yang berjudul Konflik Politik Pembebasan Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Leuwikeris Di Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dinamika proses pembebasan tanah dalam pembangunan bendungan leuwikeris serta mengetahui resolusi konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan bendungan leuwikeris di Desa Ancol Kabupaten Tasikmalaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta menggunakan perspektif strukturalisme dan pendekatan penelitian studi kasus. Dalam pemilihan informan, peneliti ini menggunakan dua teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah konflik politik, pembebasan tanah, dan pembangunan kepentingan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah guna pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dilaksanakan di delapan desa dan tiga kelurahan yaitu Desa Ancol, Desa Pasirbatang, Desa Cilangkap, Desa Manonjaya, Desa Handapherang, Desa Karanglayung, Desa Nagaratengah, Desa Ciharalang, Kelurahan Cigembor, Kelurahan Linggasari dan Kelurahan Benteng. Pembebasan tanah dalam pembangunan Bendungan Leuwikeris sudah melalui tahap pembangunan Bendungan Leuwikeris yang mencapai 59 persen. Namun, adanya perbedaan harga ganti rugi tanah dengan Kabupaten Ciamis dan kurangnya transparansi membuat masyarakat kecewa dari pembebasan tanah tersebut. Hingga akhirnya masyarakat menuntut hak tanahnya dan meminta kesetaraan harga tanah dengan Kabupaten Ciamis.

**Kata Kunci : Pembebasan Tanah, Pembangunan, Bendungan Leuwikeris**

## SUMMARY

Land Acquisition is every activity to get land by giving indemnation or compensation to people who discharging or over handling their land, building, crop and objects related to land. Land Acquisition of public interest's development executed by Land Acquisition Committee. Land Acquisition of public interest usage arranged in Republic Indonesia Presidential Decree Number 36 Year 2005 juncto Number 65 year 2006 regarding Land Acquisition for Public Interest's Development. Execution of Land Acquisition is a complex problem because there are various steps and proses which must be passed by and existence of several party's interest that contra to each other. This point will be pared in the form of a thesis entitled Execution of Land Acquisition For Leuwikeris Dam Development Project in Tasikmalaya as a mean to know process, impact for project affected people, hindrances and the way to overcome it in execution of Land Acquisition For Leuwikeris Dam Development Project in Tasikmalaya.

The method used in this research is a qualitative method using the non positivism paradigm, and using a strukturaliism perspective and case study research approach. In the selection of informants, this researcher used two purposive sampling techniques. Data collection used in this study itself was carried out by observation, in-depth interviews, and documentation. The framework of thought used in this study includes political conflicts, land acquisition and development of public interests.

The results showed that land acquisition for the construction of the Leuwikeris Dam in Tasikmalaya and Ciamis districts was carried out in eight villages and three sub-districts, namely Ancol Village, Pasirbatang Village, Cilangkap Village, Manonjaya Village, Handapherang Village, Karanglayung Village, Nagaratengah Village, Ciharalang Village, Cigembor Village. , Kelurahan Linggasari and Kelurahan Benteng. Land acquisition in the construction of the Leuwikeris Dam has gone through the Leuwikeris Dam construction stage which has reached 59 percent. However, the difference in the price of land compensation with Ciamis Regency and the lack of transparency made the community disappointed with the land acquisition. Until finally the community demanded their land rights and asked for the equality of land prices with Ciamis Regency.

***Keyword : Land Acquisition, Development, Leuwikeris Dam***